

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Prosedur pemilihan sampel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Tahun				Jumlah
		2015	2014	2013	2012	
1.	Perbankan yang terdaftar BEI	43	43	43	43	172
2.	Perusahaan dengan laporan tahunan (<i>annual report</i>) yang tidak memiliki kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing ataupun keduanya	20	20	20	20	(80)
	Jumlah Sampel Perusahaan	23	23	23	23	92

B. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis

deskriptif dengan menggunakan *SPSS 22.0* dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	92	0	1	0,26	0,442
KA	92	0	1	0,54	0,501
PROF	92	-0,07791	0,03411	0,0115424	.01672886
SIZE	92	25407409	9100634090	168368291542	225510051174,
		93	00	0,77	181
MANDISC	92	0,78431	0,98431	0,9020883	0,04609506
Valid N (listwise)	92				

Berdasarkan Tabel 4.2 Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dari penelitian ini ada 92 perusahaan. Dari 92 sampel perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pemerintah (KP) dengan frekuensi sebesar 0% sampai dengan 100% menunjukkan bahwa rata-rata variabel kepemilikan pemerintah dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,26 yang berarti 26% dari seluruh perusahaan sampel adalah perusahaan yang memiliki saham dengan kepemilikan pemerintah. Kepemilikan pemerintah dengan nilai 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut didalam kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah seperti Bank Bukopin Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Tabungan Negara Tbk, Bank Jabar Banten Tbk, Bank Mandiri Tbk. Kepemilikan pemerintah dengan nilai 0 menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2015 tidak terdapat saham dengan kepemilikan pemerintah.

Pada variabel kepemilikan saham asing (KA), dari 92 sampel perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing (KA) dengan frekuensi sebesar 0% sampai dengan 100% menunjukkan bahwa rata-rata variabel kepemilikan asing dari seluruh perusahaan sampel adalah 0,54 yang berarti 54% dari seluruh perusahaan sampel adalah perusahaan yang memiliki saham dengan kepemilikan asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dengan kepemilikan asing yang bernilai 1 berarti bahwa suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham asing diatas 40% sesuai dengan peraturan PBI No.14/8/PBI/2012 tahun 2012. Sedangkan variabel dengan kepemilikan asing yang bernilai 0 berarti bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki pemegang saham asing atau memiliki tetapi kurang dari 40% saham asing yang ada pada perusahaan tersebut.

Pada variabel profitabilitas (PROF) nilai terbesar adalah 3,41% dan nilai terkecil adalah -7,79% dengan nilai rata-rata sebesar 1,15%. Nilai standar deviasi sebesar 0,1672886. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki untuk menciptakan laba. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan rata-rata total aset sebesar Rp 168.368.291.542,77 ribu dengan nilai standar deviasi sebesar 225.510.051.174,181 dan besarnya nilai minimum dimiliki oleh Bank of India Indonesia Tbk pada tahun 2012 sebesar Rp 2.540.740.993 ribu. Besarnya nilai maksimum dimiliki oleh Bank Mandiri Tbk pada tahun 2015 sebesar Rp 910.063.409.000 ribu. Pada variabel pengungkapan *mandatory disclosure* (MANDISC), nilai yang terkecil adalah 78,4% dan

nilai yang terbesar adalah 98,4% dengan nilai rata-rata sebesar 90,2% serta nilai standar deviasinya mencapai sebesar 0,4609506. Besarnya indeks menunjukkan besarnya tingkat kepatuhan suatu perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah dimana datanya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorof-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	92
Kolmogorov-Smirnov Z	0,698
Asym. Sig. (2-tailed)	0,715

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,698 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,715 berada di atas 0,05. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal, maka data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas terjadi jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau nilai *VIF* > 10 . Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
KP	0,409	2,445	Tidak terjadi Multikolinearitas
KA	0,538	1,859	Tidak terjadi Multikolinearitas
PROF	0,777	1,288	Tidak terjadi Multikolinearitas
SIZE	0,590	1,696	Tidak terjadi Multikolinearitas

Hasil perhitungan variabel kepemilikan pemerintah (KP), kepemilikan asing (KA), profitabilitas (PROF) dan ukuran perusahaan (SIZE) pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dengan menggunakan *uji glejser*. Data dikatakan

tidak terkena heteroskedastisitas jika nilai $Sig > 0,05$. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
KP	0,135	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
KA	0,619	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
PROF	0,389	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
SIZE	0,264	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi yang dimiliki variabel kepemilikan pemerintah (KP) adalah 0,135, kepemilikan asing (KA) sebesar 0,619, variabel profitabilitas (PROF) bernilai sebesar 0,389 dan variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,264. Data dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas jika nilai Sig lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Regresi yang bebas dari autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson test* jika memenuhi syarat yaitu $du < d < 4-du$. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DU	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Nilai 4-DU	Kesimpulan
1,7523	1,823	2,2477	Tidak Terjadi Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai DW (d) sebesar 1,855 dengan jumlah sampel 92 (n) dan jumlah variabel 4 (k=4), maka pada tabel Durbin-Watson akan didapat nilai batas bawah (dl) sebesar 1,5713 dan nilai batas atas (du) sebesar 1,7523. Hasil perbandingan menunjukkan nilai DW 1.855 dengan nilai dU sebesar 1,7523 sesuai pada tabel DW. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi syarat yaitu $du < d < 4-du$ atau sebesar $1,7523 < 1,855 < 4 - 1,7523$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

D. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu analisis regresi. Analisis regresi yang dilakukan adalah uji nilai F, uji nilai t dan uji R^2 . Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan data berdistribusi normal, sehingga data yang tersedia dalam penelitian ini telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linier berganda. Hasil uji regresi disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Contant)	0,571	0,073		7,803	0,000
KP	0,039	0,014	0,378	2,882	0,005
KA	0,009	0,011	0,100	0,877	0,383
PROF	-0,570	0,262	-0,207	-2,171	0,033
SIZE	0,013	0,003	0,457	4,180	0,000
Adjusted R ²	0,359				
F Statistik	13,756				
Sig (f-statistik)	0,000				

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Nilai F)

Uji statistik nilai F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data memiliki pengaruh secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen jika nilai sig. < 0,05. Berdasarkan hasil tabel 4.7 terlihat bahwa nilai F sebesar 13,756 dan nilai sig sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham pemerintah, kepemilikan saham asing, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Nilai T)

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui hubungan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji nilai t dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut manakah diantara kelima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan.

a. Kepemilikan Pemerintah dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Variabel kepemilikan saham pemerintah (KP) pada tabel 4.7 mempunyai nilai *sig.* sebesar 0,005 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,039. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham pemerintah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) berhasil didukung.

b. Kepemilikan Asing dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Variabel kepemilikan saham asing (KA) pada tabel 4.7 mempunyai nilai *sig.* sebesar 0,383 berada di atas atau lebih dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,009. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*,

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan saham asing secara statistik berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_2) tidak berhasil didukung.

c. Profitabilitas dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Variabel profitabilitas (PROF) pada tabel 4.7 mempunyai nilai *sig.* sebesar 0,033 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,570. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_3) tidak berhasil didukung.

d. Ukuran Perusahaan dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) pada tabel 4.7 mempunyai nilai *sig.* sebesar 0,000 berada di bawah atau kurang dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,013. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_4) berhasil didukung.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat besar nilai *adjusted R²* sebesar 0,387 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 38,7%. Hal ini berarti 38.7% tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam model dan sisanya 61.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Pembahasan (Interpretasi)

1. Kepemilikan Saham Pemerintah dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kepemilikan saham pemerintah (KP) terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan saham pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Adanya hubungan antara kepemilikan saham pemerintah dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* mengandung arti bahwa semakin besar/tinggi persentase kepemilikan saham oleh pemerintah pada perusahaan maka perusahaan tersebut akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan. Menurut Diba (2012), keadaan semacam ini terjadi karena apabila suatu perusahaan memiliki persentase kepemilikan saham oleh pemerintah yang

tinggi, maka keberadaan perusahaan tersebut akan lebih disorot oleh *stakeholder*-nya termasuk pemerintah. Perhatian dan tekanan pemerintah yang besar membuat perusahaan harus lebih transparan dalam pengungkapannya. Selain itu, Zulfi (2014) mengatakan bahwa adanya intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat dan pemerintah juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham yang mayoritas pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiana (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Kepemilikan Saham Asing dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel kepemilikan saham asing (KA) terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan saham asing berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hambatan berupa regulasi terhadap kepemilikan asing pada bank di negara yang akan di invasi terutama yang memiliki regulasi cukup ketat serta goncangan yang terjadi yang dapat

mengganggu stabilitas perekonomian negara yang dimasuki bank asing tersebut sehingga manajemen dalam bank tersebut akan membatasi pengungkapannya (Hull, 2002 dalam Sabrina, 2014). Selain itu, adanya partisipasi asing pada perbankan akibat globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer asing dalam perbankan domestik, meningkatnya permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat aliran modal asing yang masuk, sehingga akan menimbulkan manajemen resiko yang tinggi. Perusahaan akan membatasi pengungkapan informasi untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi.

Umumnya perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi merupakan perusahaan besar yang juga memiliki reputasi yang besar pula di dalam dunia bisnis. Saat ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Pertumbuhan yang pesat dari kepemilikan asing ini akan membuat perusahaan asing mengalami tekanan dari masyarakat sekitar. Perusahaan akan membatasi pengungkapannya untuk mengantisipasi apabila perusahaan tersebut tidak mampu memberikan manfaat bagi sosial dan lingkungannya, karena dapat memperburuk reputasi perusahaan asing di masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathimiyah dkk., (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Sedangkan penelitian yang tidak konsisten dengan penelitian ini

adalah penelitian yang dilakukan oleh Tamba (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Profitabilitas dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel profitabilitas (ROA) terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H₃) ditolak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang pada umumnya profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terperinci, karena mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan kompensasi terhadap manajemen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif yang mengisyaratkan bahwa perusahaan dengan nilai profitabilitas tinggi belum tentu melakukan pengungkapan lebih terperinci. Hal ini didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, manajemen menganggap tidak perlu memberikan pengungkapan tentang keberhasilannya kepada publik, karena hal tersebut

tidak mempunyai pengaruh kepada posisinya dan kompensasi yang diperolehnya. Hal tersebut dapat terjadi karena penentuan posisi dan kompensasi manajemen pada perusahaan publik di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh pemegang saham mayoritas yang pada umumnya adalah pemilik perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan lebih banyak dikarenakan pada umumnya investor pada perusahaan yang *go public* tidak hanya melihat perusahaan tersebut dari sisi profitabilitasnya saja, akan tetapi dari kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Meskipun tingkat profitabilitas rendah, perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan dengan harapan para pengguna laporan akan membaca *goodnews* tentang perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Selain itu, apabila dilihat dari *earnings per share* suatu perusahaan meskipun mempunyai laba yang rendah perusahaan tersebut akan tetap mengungkapkan informasi lebih banyak dikarenakan investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memberikan banyak informasi karena dapat mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai profitabilitas kecil akan mengungkapkan informasi lebih lengkap untuk memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan disisi lain investor percaya akan kelangsungan hidup perusahaan dan tetap menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Selain itu, budaya yang berkembang di Indonesia menganggap bahwa praktik *corporate governance* adalah suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, perusahaan yang berusaha menerapkan *corporate governance* dengan baik akan tetap mengungkapkan informasi yang memadai. Meskipun profitabilitas perusahaan kecil, perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan lebih banyak guna memenuhi prinsip-prinsip *corporate governance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pelamonia (2015) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

4. Ukuran perusahaan dan Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*, hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai beta sebesar 0,013 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) diterima.

Penelitian ini sesuai dengan hipotesis yaitu variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Menurut Pelamonia (2015), ukuran perusahaan berpengaruh tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* karena sesuai dengan konsep teori agensi yang

menjelaskan bahwa perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi karena memiliki struktur organisasi yang kompleks dan sumber daya yang banyak dan untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan cenderung meningkatkan pengungkapannya. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan dan makin besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi dalam mempertahankan eksistensi perusahaan.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2011), Adhi (2012), Pelamonia (2015), Widati & Wigati (2011), dan Trimuharmi (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Besar ukuran perusahaan salah satunya dapat dinyatakan dalam total asset, apabila semakin besar total asset maka semakin besar ukuran perusahaan itu. Semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin besar total penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan itu dikenal oleh masyarakat (Prasetya, 2011).